



Katalog BPS : 4601004.14

# Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau Tahun 2009 - 2013



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI RIAU**

# **Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau Tahun 2009 - 2013**

**ISBN. 979-484-645-7**

**No. Publikasi : 14.523.2015.05**

**Katalog BPS : 4601004.14**

**Ukuran Buku : 17 Cm x 24 Cm**

**Jumlah Halaman : 46**

**Naskah :**

**Seksi Statistik Ketahanan Sosial**

**Bidang Statistik Sosial**

**Gambar Kulit :**

**Seksi Statistik Ketahanan Sosial**

**Bidang Statistik Sosial**

**Diterbitkan oleh**

**Badan Pusat Statistik Provinsi Riau**

**Boleh dikutip dengan menuliskan sumbernya**

## KATA PENGANTAR

Publikasi Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau Tahun 2009 - 2013 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Riau berisi berbagai data dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi di Provinsi Riau. Publikasi Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau Tahun 2009 - 2013 diterbitkan untuk melengkapi publikasi-publikasi yang sudah terbit secara rutin setiap tahun.

Materi yang disajikan dalam Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau Tahun 2009 - 2013 memuat berbagai informasi mengenai indikator-indikator demokrasi yang digunakan sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas di Provinsi Riau. IDI memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi pada tingkat provinsi. Melalui IDI, keadaan demokrasi di Provinsi Riau relatif dapat digambarkan dengan lebih jelas. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan, terutama di bidang politik.

Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik, baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas.

Pekanbaru, Maret 2015  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Riau



Drs. Mawardi Arsad, M.Si

# Organisasi Penulisan

## *Pengarah :*

Drs. Mawardi Arsad, M.Si

## *Editor :*

Siti Mardiyah, MA

Emilia Dharmayanthi, SST

## *Penulis :*

Hanifah, SST

Iswenda Noviani, SST

## *Pengolah Data :*

Hanifah, SST

Iswenda Noviani, SST

## *Setting :*

Hanifah, SST

Iswenda Noviani, SST

# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	ii
Organisasi Penulisan .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Grafik .....	vii
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Perkembangan Demokrasi Global .....	2
1.2    Urgensi Demokrasi di Indonesia .....	2
1.2.1    Apa Itu IDI? .....	3
1.2.2    Mengapa IDI Diperlukan? .....	3
1.3    Konsep dan Metodologi Indeks Demokrasi Indonesia .....	5
1.3.1    Kerangka Konseptual IDI .....	5
1.3.1.1    Aspek Kebebasan Sipil ( <i>Civil Liberties</i> ) .....	5
1.3.1.2    Aspek Hak-Hak Politik ( <i>Political Rights</i> ) .....	6
1.3.1.3    Aspek Lembaga Demokrasi ( <i>Institutions of Democracy</i> ) .....	7
1.3.2    Metodologi IDI .....	8
1.3.2.1    Review Media dan Dokumen .....	9
1.3.2.2 <i>Focused Group Discussion</i> (FGD) .....	9
1.3.2.3 <i>Indepth Interview</i> .....	10
1.3.3    Skala Kinerja Demokrasi .....	10
<b>BAB II     PROFIL IDI RIAU 2009 – 2013 .....</b>	<b>15</b>
2.1    Dinamika IDI Provinsi Riau Tahun 2009 – 2013 .....	16

2.2	Indeks Kebebasan Sipil .....	18
2.2.1	Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat .....	19
2.2.2	Variabel Kebebasan Berpendapat .....	20
2.2.3	Variabel Kebebasan Berkeyakinan .....	20
2.2.4	Variabel Kebebasan dari Diskriminasi .....	21
2.3	Indeks Hak-Hak Politik .....	24
2.3.1	Variabel Hak Memilih dan Dipilih .....	25
2.3.2	Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan .....	26
2.4	Indeks Lembaga Demokrasi .....	29
2.4.1	Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil .....	30
2.4.2	Variabel Peran DPRD .....	31
2.4.3	Variabel Peran Partai Politik .....	31
2.4.4	Variabel Peran Birokrasi Pemerintah .....	32
2.4.5	Variabel Peran Peradilan yang Independen .....	32
<b>BAB III</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>36</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Variabel dan Indikator pada Aspek Kebebasan Sipil ..... 12
Tabel 1.2	Variabel dan Indikator pada Aspek Hak-Hak Politik ..... 13
Tabel 1.3	Variabel dan Indikator pada Aspek Lembaga Demokrasi ..... 14
Tabel 2.2.1	Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Kebebasan Sipil ... 22
Tabel 2.2.2	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat ..... 22
Tabel 2.2.3	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan Berpendapat ..... 22
Tabel 2.2.4	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan Berkeyakinan ..... 23
Tabel 2.2.5	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan dari Diskriminasi ... 23
Tabel 2.3.1	Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Hak-Hak Politik ... 28
Tabel 2.3.2	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Hak Memilih dan Dipilih ..... 28
Tabel 2.3.3	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan ..... 28
Tabel 2.4.1	Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Lembaga Demokrasi ..... 34
Tabel 2.4.2	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil ..... 34
Tabel 2.4.3	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran DPRD ..... 34
Tabel 2.4.4	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran Partai Politik ..... 35
Tabel 2.4.5	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran Birokrasi Pemerintah ..... 35
Tabel 2.4.6	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran Peradilan yang Independen ..... 35

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1.1 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau, 2009 – 2013 .....	16
Grafik 2.1.2 Sebaran Nilai Aspek Idi Provinsi Riau, 2009 – 2013 .....	17

<http://riau.bps.go.id>

1

# PENDAHULUAN

<http://riau.bps.go.id>



## Pendahuluan

---

### 1.1 Perkembangan Demokrasi Global

Akhir-akhir ini masyarakat dunia menjadi saksi dua fenomena menarik terkait dengan perkembangan demokrasi global. *Pertama*, terjadinya gelombang besar demokratisasi yang melanda sejumlah negara yang sebelumnya dikenal tidak bersahabat atau bahkan resisten terhadap ide-ide demokrasi, misalnya negara-negara di kawasan Timur Tengah. Fenomena yang sering disebut sebagai *The Arab Spring* ini telah menurunkan rezim-rezim otoriter di Tunisia, Mesir, dan Libya. Gelombang ini merefleksikan kecenderungan global yang kuat untuk menerima demokrasi sebagai pilihan sistem politik dan pemerintahan yang sah.

*Kedua*, pada kurun waktu yang sama, banyak negara yang telah melalui proses demokratisasi pada gelombang sebelumnya justru mengalami

kemerosotan kualitas demokrasi. Kecenderungan kedua ini membawa sejumlah ahli pada kesimpulan bahwa sedang terjadi resesi demokrasi (*democratic recession*) atau penurunan kualitas demokrasi (*democratic decline*). Penurunan kualitas demokrasi ini merupakan konsekuensi dari lambatnya konsolidasi.

### 1.2 Urgensi Indeks Demokrasi di Indonesia

Dalam dua dasawarsa terakhir, pengukuran demokrasi menjadi topik hangat di kalangan akademik serta pemerhati dan praktisi pembangunan. Gelombang demokratisasi global telah menjadikan separuh penduduk dunia kini hidup dalam sistem demokrasi, dengan berbagai variasi pada tataran praktiknya. Oleh karena itu muncul kebutuhan untuk mengetahui sejauh mana demokratisasi telah berjalan serta melakukan perbandingan antar-negara.

Indonesia, yang menjalani transisi demokrasi besar-besaran, sering disebut sebagai *big bang transition*; juga merasakan kebutuhan ini. Bahkan, dengan variasi antar-daerah yang sangat lebar, kebutuhan ini menjadi sangat terasa. Indonesia perlu mengetahui tingkat perkembangan demokrasi di tingkat daerah karena keberhasilannya sebagai negara demokratik akan sangat tergantung pada sejauh mana demokrasi berkembang dan diterapkan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

### 1.2.1 Apa Itu IDI?

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. IDI merupakan pengukuran yang *country specific*; yang dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial politik Indonesia. Oleh karena itu, dalam merumuskan konsep demokrasi maupun metode

pengukurannya IDI mempertimbangkan kekhasan persoalan Indonesia.

Empat prinsip dasar penyusunan IDI antara lain:

1. IDI hanya mengukur perkembangan demokrasi politik di provinsi.
2. IDI hanya mengindikasikan potret demokrasi di provinsi.
3. IDI mengukur demokrasi dari dua sisi, yaitu sisi negara (pemerintah) dan masyarakat.
4. IDI bukan merupakan tujuan akhir tetapi merupakan tujuan antara untuk merealisasikan kehidupan masyarakat yang bebas.

### 1.2.2 Mengapa IDI Diperlukan?

Setelah berakhirnya Orde Baru yang ditandai oleh turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada bulan Mei 1998, terbuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan reformasi penyelenggaraan negara. Demokrasi merupakan pilihan satu-satunya, karena memang tidak ada bentuk pemerintahan

atau sistem politik lain yang lebih tepat untuk menggantikan sistem politik Orde Baru yang otoriter.

Sekarang, setelah enam belas tahun berjalan sejak Reformasi, muncul pertanyaan sejauh mana sesungguhnya perkembangan demokrasi ini, khususnya pada tingkat provinsi? Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan pengukuran demokrasi yang komprehensif dan obyektif. Keberadaan pengukuran seperti ini juga diharapkan memicu *diskursus* di antara pemangku kepentingan, mendorong kompetisi yang sehat dan berbagi (*sharing*) pengalaman di antara pemerintah daerah, serta menyediakan data yang sangat dibutuhkan terkait dengan ranah pembangunan demokrasi yang perlu mendapat perhatian.

IDI dibuat dengan provinsi sebagai unit analisa. Dengan kata lain, IDI adalah suatu alat ukur yang dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya

bagaimana kondisi atau status perkembangan demokrasi politik pada tingkat provinsi di Indonesia. Dengan demikian, IDI merupakan potret demokrasi pada tingkat provinsi.

IDI diharapkan memiliki sejumlah manfaat. *Pertama*, secara akademis dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Data yang diperoleh dari IDI dapat membantu mereka yang mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, seperti para mahasiswa, ilmuwan, dan wartawan. Keberadaan IDI merupakan kemajuan dalam studi perkembangan demokrasi di Indonesia karena untuk pertama kalinya perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia dapat diketahui dengan pasti.

Kedua, bagi perencanaan pembangunan politik di tingkat provinsi. Data-data yang ditunjukkan IDI mampu menunjukkan aspek, variabel, atau indikator mana saja yang tidak atau

kurang berkembang, sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan, baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan. Seluruh pemangku kepentingan dapat menunjuk data IDI sebagai rujukan dalam proses *deliberasi* perumusan kebijakan dan program pembangunan politik atau proses demokrasi berdasarkan bukti-bukti empiris.

### 1.3 Konsep dan Metodologi Indeks Demokrasi Indonesia

Bab ini akan menyajikan konseptualisasi dan kontekstualisasi demokrasi dalam rangka membangun Indeks Demokrasi Indonesia.

#### 1.3.1 Kerangka Konseptual IDI

Secara sederhana, definisi demokrasi adalah sistem pemerintahan yang ditandai antara lain oleh adanya kebebasan yang diatur dalam undang-

undang yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam menyusun IDI disepakati tiga aspek yang dijadikan objek kajian. Tiga aspek yang dimaksud adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak Politik (*Political Rights*), dan Kelembagaan Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Aspek pertama dan kedua merefleksikan esensi konsep demokrasi. Namun demikian, mengingat dua esensi dasar dari demokrasi tersebut tidak mungkin akan dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya “wadah”, struktur, dan prosedur pendukung, maka Kelembagaan Demokrasi juga dianggap sebagai aspek penting demokrasi. Atas dasar pertimbangan inilah, dalam penyusunan IDI kelembagaan demokrasi didudukkan sebagai aspek ketiga.

##### 1.3.1.1 Aspek Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*)

Secara sederhana, kebebasan sipil dapat didefinisikan sebagai kebebasan

individu/warga negara dan kelompok individu untuk berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi dan pengekangan yang berasal dari individu/warga negara lainnya, kekuasaan negara, dan kelompok masyarakat tertentu. Namun demikian, dalam konteks IDI, kebebasan sipil yang akan dilihat dibatasi hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu.

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan IDI, aspek Kebebasan Sipil tersebut telah diturunkan ke dalam sejumlah variabel sebagai berikut:

- 1) Kebebasan Berkumpul dan Berserikat,
- 2) Kebebasan Berpendapat,
- 3) Kebebasan Berkeyakinan,
- 4) Kebebasan dari Diskriminasi.

Sementara pada tingkat indikator, terdapat 10 (sepuluh) indikator dalam

aspek Kebebasan Sipil ini, yang terdiri dari dua indikator pada variabel pertama dan kedua, serta masing-masing tiga indikator pada variabel ketiga dan keempat.

### 1.3.1.2 Aspek Hak-Hak Politik (Political Rights)

*Political Rights* merupakan indikator demokrasi politik yang cukup lengkap, mencakup partisipasi dan kompetisi. Dalam konteks IDI, Hak-Hak Politik diturunkan ke dalam dua variabel yakni:

- 1) Hak Memilih dan Dipilih,
- 2) Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan.

Sementara pada tingkat indikator, aspek Hak-Hak Politik memiliki tujuh indikator yang terdiri dari lima indikator pada variabel pertama, dan 2 indikator pada variabel kedua.

### 1.3.1.3 Aspek Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*)

Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik sebagai pilar dari konsep demokrasi tidak mungkin dapat teraktualisasi secara maksimal tanpa didukung oleh lembaga demokrasi. Atas dasar pertimbangan ini, cukup beralasan bila beberapa akademisi telah mengartikulasi lembaga demokrasi sebagai aspek yang tidak terpisahkan dari kebebasan sipil dan hak-hak politik.

Mengingat begitu krusialnya peran dari lembaga demokrasi tersebut, maka bagi mereka yang berafiliasi dengan perspektif ini acapkali mengatakan bahwa satu di antara yang membedakan antara demokrasi dan anarki adalah karena kebebasan sipil dalam praktik demokrasi dilakukan secara institusional, atau dengan kata lain didasarkan pada aturan, norma, prosedur dan kelembagaan yang telah disepakati secara bersama.

Pada konteks ilmu politik, institusi telah didefinisikan sebagai lembaga publik yang dibentuk dan difungsikan untuk mengatur dan melaksanakan aktivitas negara. Bila definisi ini dikaitkan dengan konsep demokrasi, maka institusi yang dimaksud adalah institusi-institusi negara yang dibentuk dan difungsikan untuk menopang terbentuk dan bekerjanya sistem politik yang demokratis.

Dengan merujuk sejumlah elemen dari institusi demokrasi, untuk tujuan pengukuran IDI, aspek Lembaga Demokrasi pun telah dioperasionalkan ke dalam sejumlah variabel berikut:

- 1) Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil,
- 2) Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),
- 3) Peran Partai Politik,
- 4) Peran Birokrasi Pemerintah Daerah,
- 5) Peradilan yang Independen.

Pada tingkat indikator, aspek Lembaga Demokrasi diturunkan ke dalam sembilan indikator, dengan rincian

dua indikator pada variabel pertama, ketiga, keempat, dan kelima, serta tiga indikator pada variabel kedua.

Dengan demikian, secara keseluruhan, komponen yang membentuk IDI 2009 – 2013 terdiri atas 3 Aspek, 11 Variabel, dan 28 Indikator. Informasi lebih rinci tentang indikator dari masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 1.

### 1.3.2 Metodologi IDI

Pada tingkat yang paling kongkrit, IDI melalui indikator-indikator dari ketiga aspek penting demokrasi, menilai apakah ada aturan, situasi atau kejadian yang mencerminkan ada atau tidak adanya, berkembang atau terhambatnya demokrasi di suatu provinsi. Kondisi demokrasi di suatu daerah dapat dimanifestasikan dalam berbagai indikator, seperti aturan-aturan yang ada, perilaku masyarakat, dan sebagainya.

Selanjutnya berbagai indikasi keadaan demokrasi ini dapat ditangkap melalui berbagai medium seperti dokumen-dokumen resmi, laporan di media masa (cetak maupun elektronik), serta dalam opini masyarakat yang hidup di tempat itu. Dengan demikian ada berbagai data yang mungkin digunakan untuk menangkap kondisi demokrasi, baik itu data kuantitatif maupun data kualitatif.

Menjawab tantangan metodologis di atas, IDI menggunakan metode Triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi silang (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Sehubungan dengan itu, ada empat metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu: *review media/telaah media* (analisis isi berita surat kabar), *review document* (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah), *focused-group discussion/FGD* (diskusi terarah terbatas),

dan *indepth interview* (wawancara mendalam).

### 1.3.2.1 Review Media dan Dokumen

Review media dan dokumen dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data, karena baik media maupun dokumen dianggap sebagai sumber informasi paling realistis untuk mendapatkan data kuantitatif (dalam kurun waktu pengamatan satu tahun) berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI.

Surat kabar atau koran diyakini sebagai sumber informasi yang paling relevan dalam merekam kehidupan daerah, termasuk didalamnya denyut demokrasi atau proses demokratisasi, selama satu tahun secara terus menerus dari hari ke hari.

Dalam konteks penyusunan IDI, persyaratan yang pertama merujuk pada aspek, variabel, dan indikator IDI. Sedangkan untuk memenuhi syarat yang

kedua, ditetapkan media yang dimaksud adalah surat kabar terkemuka di Provinsi Riau. Sementara untuk jenis dokumen, yang digunakan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan DPRD –seperti Peraturan Daerah (Perda), Surat Keputusan Gubernur, Surat Keputusan DPRD serta dokumen-dokumen resmi lainnya seperti data demonstrasi dari Kepolisian dan data pemilih.

### 1.3.2.2 Focused Group Discussion (FGD)

Secara umum, tujuan utama dari penggunaan FGD adalah untuk menjangkau data kualitatif berkaitan dengan aspek, variabel dan indikator IDI. Secara khusus, tujuan FGD dalam pengumpulan data IDI adalah *pertama*, untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah

berhasil dikumpulkan melalui review media dan dokumen.

*Kedua*, melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap indikator IDI. *Ketiga*, menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui review media dan review dokumen.

### 1.3.2.3 *Indepth Interview*

Pada konteks penyusunan IDI, wawancara mendalam (*indepth interview*) digunakan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman informasi yang telah diperoleh melalui review media dan dokumen serta FGD. Karena itu, *indepth interview* bukan merupakan metode utama dalam proses pengumpulan data melainkan sebagai komplementer karena melengkapi ketiga metode lainnya.

Dengan peran seperti ini, *indepth interview* baru dilakukan setelah FGD

berlangsung guna mendalami berbagai informasi terkait kasus-kasus yang belum terungkap secara maksimal dalam FGD. Kendati *indepth interview* bersifat komplementer terhadap metode pengumpulan data lainnya, namun memiliki peran yang tidak kalah penting karena berperan sebagai “pos” terakhir dalam pengumpulan data kualitatif.

Keterkaitan empat metode di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: dua metode pertama (review media dan dokumen) berperan sebagai basis utama dalam pengumpulan data kuantitatif berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Selanjutnya, data kuantitatif melalui review media dan dokumen diverifikasi dan dielaborasi dengan data kualitatif yang dikumpulkan melalui dua metode berikutnya (FGD dan *indepth interview*).

### 1.3.3 Skala Kinerja Demokrasi

Untuk menggambarkan capaian kinerja demokrasi di Provinsi Riau,

digunakan skala 1 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi. Kinerja terendah (nilai indeks = 1) secara teoritik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 1). Sebaliknya, kinerja tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi (skor 5).

Selanjutnya untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks antar provinsi yang dihasilkan, skala 1 – 100 di atas dibagi ke dalam tiga kategori kinerja demokrasi, yaitu “**baik**” (indeks > 80), “**sedang**” (indeks 60 – 80) dan “**buruk**” (indeks < 60).

**Tabel 1.1**

**Variabel dan Indikator pada Aspek Kebebasan Sipil**

**Variabel I : Kebebasan Berkumpul dan Berserikat**

**Indikator 1**

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

**Indikator 2**

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

**Variabel II : Kebebasan Berpendapat**

**Indikator 3**

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat.

**Indikator 4**

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.

**Variabel III : Kebebasan Berkeyakinan**

**Indikator 5**

Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya.

**Indikator 6**

Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya.

**Indikator 7**

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama.

**Variabel IV: Kebebasan dari Diskriminasi**

**Indikator 8**

Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

**Indikator 9**

Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

**Indikator 10**

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

**Tabel 1.2**  
**Variabel dan Indikator pada Aspek Hak-Hak Politik**

**Variabel V : Hak Memilih dan Dipilih**

**Indikator 11**

Kejadian di mana hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat.

**Indikator 12**

Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih.

**Indikator 13**

Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT).

**Indikator 14**

Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (*voters turnout*).

**Indikator 15**

Jumlah perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.

**Variabel VI : Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan**

**Indikator 16**

Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan.

**Indikator 17**

Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

**Tabel 1.3**

**Variabel dan Indikator pada Aspek Lembaga Demokrasi**

**Variabel VII : Pemilu yang Bebas dan Adil**

**Indikator 18**

Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu.

**Indikator 19**

Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

**Variabel VIII : Peran DPRD**

**Indikator 20**

Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap Total APBD.

**Indikator 21**

Jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan.

**Indikator 22**

Rekomendasi DPRD kepada eksekutif.

**Variabel IX : Peran Partai Politik**

**Indikator 23**

Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu.

**Indikator 24**

Jumlah perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi.

**Variabel X: Peran Birokrasi Pemerintah Daerah**

**Indikator 25**

Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif.

**Indikator 26**

Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif.

**Variabel XI: Peran Peradilan yang Independen**

**Indikator 27**

Keputusan hakim yang kontroversial.

**Indikator 28**

Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.





<http://riau.bps.go.id>

# PROFIL IDI RIAU

2009 - 2013



## Profil IDI Riau 2009 - 2013

Bab ini menguraikan hasil Indeks demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau tahun 2009 – 2013. Secara berturut-turut akan disampaikan hasil Indeks Provinsi yang merupakan rata-rata capaian Indeks Aspek Kebebasan Sipil, Indeks Aspek Hak-hak Politik dan Indeks Aspek Lembaga Demokrasi.

### 2.1 Dinamika IDI Provinsi Riau Tahun 2009 – 2013

Pada tahun 2013, nilai capaian Indeks Demokrasi Provinsi Riau adalah 68,37. Nilai ini merupakan sumbangan dari ketiga aspek yang diukur yaitu Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi. Dalam skala pengukuran IDI yang berkisar dari 0 sampai dengan 100, nilai indeks Provinsi Riau di atas menunjukkan bahwa kualitas kinerja demokrasi di Provinsi Riau masih tergolong “sedang”. Untuk

membandingkan capaian indeks demokrasi Provinsi Riau Tahun 2009 – 2013, dapat dilihat pada Grafik 2.1.1.

**Grafik 2.1.1**  
**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di**  
**Provinsi Riau, 2009 – 2013**



Bila dibandingkan dengan capaian indeks demokrasi Provinsi Riau pada tahun 2013 (68,37), tahun 2012 (67,00), tahun 2011 (70,65), tahun 2010 (71,45), dan tahun 2009 (75,85), nilai indeks Provinsi Riau yang naik turun akan tetapi tidak mengubah kategori kualitas capaian kinerja demokrasi. Indeks demokrasi tersebut merupakan

perkiraan berdasarkan metodologi yang valid dari kinerja demokrasi di Provinsi Riau.

**Grafik 2.1.2**  
**Sebaran Nilai Capaian Aspek IDI Provinsi Riau, 2009 – 2013**



Grafik 2.1.2 menunjukkan sebaran dan perbandingan nilai capaian Aspek Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik, dan Lembaga Demokrasi tahun 2009 – 2013. Pola sebaran capaian ketiga aspek setiap tahun tidak sama. Pada tahun 2009 dan 2010, Kebebasan Sipil merupakan aspek dengan nilai capaian paling tinggi, diikuti Lembaga Demokrasi dan Hak-Hak Politik. Namun pada tahun 2011, 2012, dan 2013, Lembaga Demokrasi merupakan aspek

dengan nilai capaian paling tinggi, diikuti Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik.

Capaian aspek Kebebasan Sipil tahun 2013 perlu mendapat perhatian khusus, karena untuk pertama kali sejak tahun 2009 hingga 2013, capaian aspek Kebebasan Sipil Provinsi Riau tidak mencapai angka 80, yang berarti penurunan kategori kualitas dari “baik” menjadi “sedang”. Capaian aspek Lembaga Demokrasi masih tergolong dalam kategori “baik”; sementara capaian aspek Hak-hak Politik tetap dengan kategori “buruk”.

Bila dilihat kecenderungan indeks dalam ketiga aspek, pada tahun 2012 capaian semua aspek menurun. Kecenderungan lima tahun pengukuran, menunjukkan bahwa aspek Kebebasan Sipil terus menunjukkan penurunan –dari 93,14 pada tahun 2009 menjadi 77,71 pada tahun 2013. Sementara aspek Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi masih menunjukkan naik turun.

## 2.2 Indeks Kebebasan Sipil

Aspek Kebebasan Sipil IDI mengukur kebebasan individu dan kelompok dalam kaitannya dengan kekuasaan negara dan atau kelompok. Dengan kata lain, IDI tidak mengukur tingkat kebebasan individu atau warga negara dari individu atau warga negara lainnya.

Nilai indeks aspek Kebebasan Sipil IDI 2013 Provinsi Riau mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar 2,50 poin, dari 80,21 pada tahun 2012 menjadi 77,71 pada tahun 2013, yang berarti nilai indeks aspek Kebebasan Sipil hanya mencapai kategori “sedang”. Penurunan nilai indeks ini perlu dicermati karena untuk pertama kalinya selama 5 tahun sejak 2009, nilai indeks aspek Kebebasan Sipil meluncur di bawah nilai 80 (kategori “tinggi”). Perkembangan ini sekaligus menunjukkan penurunan yang konsisten dari 93,14 pada tahun 2009 menjadi 91,02 tahun 2010, 83,12 tahun 2011, 80,21 tahun 2013, dan 77,71 tahun 2013.

Nilai indeks aspek Kebebasan Sipil Tahun 2013 dibentuk dari komposit nilai indeks empat variabel yaitu: variabel “Kebebasan Berkumpul dan Berserikat” (98,75), “Kebebasan Berpendapat” (90,00), “Kebebasan Berkeyakinan” (79,47), dan “Kebebasan dari Diskriminasi” (61,25). Dibanding IDI 2012, nilai indeks keempat variabel dalam aspek Kebebasan Sipil IDI 2013, tiga variabel mengalami peningkatan yaitu variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, Kebebasan Berpendapat, dan Kebebasan dari Diskriminasi. Sementara variabel Kebebasan Berkeyakinan mengalami penurunan indeks.

Tabel 2.2.1 menggambarkan sebaran nilai keempat variabel pada aspek Kebebasan Sipil IDI 2013 serta perbandingannya dengan IDI 2012, 2011, 2010, dan 2009. Hasil IDI 2013 dibandingkan dengan hasil IDI 2012, capaian nilai indeks aspek Kebebasan Sipil di Provinsi Riau turun 2,50 poin, dan penurunan nilai indeks tersebut disumbang oleh variabel Kebebasan

Berkeyakinan yang indeksinya turun paling drastis, sebanyak 7,85 poin. Sementara variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat naik 7,50 poin, variabel Kebebasan Berpendapat naik 13,88 poin, dan variabel Kebebasan dari Diskriminasi naik 0,69 poin.

Penjelasan berikut akan menguraikan secara lebih rinci perolehan nilai indeks setiap variabel.

### 2.2.1 Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

Nilai indeks variabel “Kebebasan Berkumpul dan Berserikat” (98,75) disumbang oleh nilai skor dua indikator yang terdapat di dalamnya. Pertama, indikator yang menjelaskan Jumlah Ancaman Kekerasan Atau Penggunaan Kekerasan Oleh Aparat Pemerintah Daerah Yang Menghambat Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat dengan nilai 100,00. Kedua, skor indikator yang menjelaskan Jumlah Ancaman Kekerasan

Atau Penggunaan Kekerasan Oleh Warga Masyarakat dengan nilai 90,00.

Tabel 2.2.2 memperlihatkan nilai indeks variabel “Kebebasan Berkumpul dan Berserikat” di Provinsi Riau mengalami peningkatan pada tahun 2013 dibandingkan dengan skor tahun 2012, diakibatkan meningkatnya skor indikator Jumlah Ancaman Kekerasan Atau Penggunaan Kekerasan Oleh Aparat Pemerintah Daerah Yang Menghambat Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat sebanyak 10,00 poin. Sementara skor indikator Jumlah Ancaman Kekerasan Atau Penggunaan Kekerasan Oleh Warga Masyarakat menurun sebanyak 10,00 poin.

Dibandingkan dengan 2012, hasil IDI 2013 mengindikasikan peningkatan perilaku pemerintah daerah yang menggunakan cara-cara dialog dalam komunikasi politik mereka dengan masyarakat. Sementara, perilaku anarkis masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat mengalami eskalasi. Artinya, selama

tahun 2013 hak kebebasan warga untuk berkumpul dan berserikat mengalami hambatan lebih serius.

### 2.2.2 Variabel Kebebasan Berpendapat

Nilai indeks Variabel “Kebebasan Berpendapat” di Provinsi Riau pada tahun 2013 adalah sebesar 90,00. Dibandingkan dengan IDI 2012, nilai variabel Kebebasan Berpendapat naik 13,88 poin, dari 76,12 pada 2012.

Nilai yang tinggi tersebut disebabkan oleh nilai skor yang naik pada indikator Ancaman/Penggunaan Kekerasan Oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berpendapat sebanyak 16,67 poin di mana nilainya pada tahun 2012 sebesar 73,33 menjadi 90,00 pada tahun 2013. Sementara skor indikator Ancaman/Penggunaan Kekerasan Oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat tidak mengalami perubahan dari tahun 2012 ke tahun 2013. Skor indikator yang

berkontribusi terhadap variabel kebebasan Berpendapat tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2.3.

Kenaikan nilai variabel Kebebasan Berpendapat yang cukup tinggi tersebut mengindikasikan semakin berkurangnya penggunaan kekerasan yang menghambat pemenuhan hak asasi warga terkait dengan kebebasan berpendapat. Hambatan kebebasan berpendapat baik dari pemerintah maupun dari sesama warga menurun seiring dengan berkurangnya perilaku brutal dan anarkis pemerintah dan masyarakat.

### 2.2.3 Variabel Kebebasan Berkeyakinan

Nilai indeks variabel Kebebasan Berkeyakinan di Provinsi Riau justru mengalami penurunan nilai yang cukup tinggi, sebesar 7,85 poin, dari 87,32 pada tahun 2012 menjadi 79,47 pada tahun 2013. Nilai variabel tersebut didukung oleh skor tiga indikator di dalamnya.

Seperti dikemukakan Tabel 2.2.4, penurunan nilai indeks dalam variabel ini terjadi akibat penurunan dua indikator, sementara satu indikator lainnya tidak mengalami perubahan.

#### 2.2.4 Variabel Kebebasan dari Diskriminasi

Dibandingkan hasil IDI 2012, nilai indeks variabel “Kebebasan dari Diskriminasi” di Provinsi Riau naik sebesar 0,69 poin dari 60,56 pada tahun 2012 menjadi 61,25 pada tahun 2013 (lihat Tabel 2.2.5). Nilai variabel tersebut disumbang oleh tiga indikator di dalamnya. *Pertama*, nilai indikator tentang Jumlah Aturan Tertulis Yang Diskriminatif Dalam Hal Gender, Etnis Atau Terhadap Kelompok Rentan Lainnya sebesar 16,67 pada tahun 2013.

Angka ini tidak mengalami perubahan sejak tahun 2012. Akan tetapi perlu dicatat, penurunan indeks dari indikator ini sudah terjadi sejak tahun 2012. Indeks pada tahun 2012 sebesar 16,67, turun 33,33 poin bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang indeksnya sebesar 50,00.

**Tabel 2.2.1**  
**Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Kebebasan Sipil**

Variabel	2009	2010	2011	2012	2013
	93,14	91,02	83,12	80,21	77,71
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	98,75	100,00	100,00	91,25	98,75
Kebebasan Berpendapat	77,79	91,65	100,00	76,12	90,00
Kebebasan Berkeyakinan	100,00	100,00	79,12	87,32	79,47
Kebebasan dari Diskriminasi	80,40	80,40	80,40	60,56	61,25

**Tabel 2.2.2**  
**Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat**

Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2009	2010	2011	2012	2013
	98,75	100,00	100,00	91,25	98,75
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00	100,00	90,00	100,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	90,00	100,00	100,00	100,00	90,00

**Tabel 2.2.3**  
**Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan Berpendapat**

Variabel Kebebasan Berpendapat	2009	2010	2011	2012	2013
	77,79	91,65	100,00	76,12	90,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	73,33	100,00	100,00	73,33	90,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	50,00	100,00	90,00	90,00

**Tabel 2.2.4**  
**Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan Berkeyakinan**

Variabel Kebebasan Berkeyakinan	2009	2010	2011	2012	2013
	100,00	100,00	79,12	87,32	79,47
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya	100,00	100,00	95,65	95,65	86,96
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya	100,00	62,50	37,50	15,00	0,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	100,00	90,00	40,00	100,00	100,00

**Tabel 2.2.5**  
**Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan dari Diskriminasi**

Variabel Kebebasan dari Diskriminasi	2009	2010	2011	2012	2013
	80,40	80,40	80,40	60,56	61,25
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	50,00	50,00	50,00	16,67	16,67
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00	100,00	87,50	90,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00	100,00	90,00	90,00

### 2.3 Indeks Hak-Hak Politik

Nilai indeks aspek Hak-Hak Politik di Provinsi Riau sejak dilakukan pengukuran IDI 2009 selalu berfluktuasi. Dengan kata lain, sejak tahun 2009 nilai indeks aspek Hak-Hak Politik mengalami peningkatan dan penurunan, yakni dari 65,40 tahun 2009, menjadi 47,19 tahun 2010, menjadi 52,90 tahun 2011, menjadi 47,16 tahun 2012, dan menjadi 52,19 pada tahun 2013.

Indeks Hak-Hak Politik 2013 meningkat sebesar 5,03 poin dibandingkan tahun 2012. Meskipun peningkatan ini sendiri secara statistik tidak signifikan dan tidak mengubah gambaran kualitas pemenuhan hak-hak politik, namun yang memprihatinkan adalah bahwa indeks Hak-Hak Politik ini cukup rendah. Secara umum, hal ini menyiratkan kemungkinan adanya stagnasi dalam pemenuhan hak-hak politik.

Indeks untuk aspek Hak-Hak Politik di Provinsi Riau pada IDI 2013 adalah

52,19 merupakan angka yang paling rendah dari ketiga aspek IDI. Hal ini berarti hak-hak politik masih menghadapi berbagai kendala dalam perkembangannya. Pola perolehan untuk aspek ini tidak berbeda dengan IDI 2009, 2010, 2011, dan 2012 karena angka untuk aspek Hak-Hak Politik adalah yang paling rendah. Indeks pada tahun 2013 yang rendah tersebut disebabkan oleh rendahnya indeks dua variabel yang ada dalam aspek Hak-Hak Politik, yakni “Hak Memilih dan Dipilih” yang nilai indeksnya 52,85, dan “Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” yang nilai indeksnya 51,52, lebih rendah dari nilai indeks variabel yang pertama (lihat Tabel 2.3.1).

Di dalam aspek Hak-Hak Politik terdapat dua variabel yakni “Hak Memilih dan Dipilih” yang mempunyai lima indikator dan “Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” yang mempunyai dua indikator.

### 2.3.1 Variabel Hak Memilih dan Dipilih

Nilai indeks variabel “Hak Memilih dan Dipilih” di Provinsi Riau pada tahun 2013 tidak mengalami perubahan dibanding nilai indeks pada tahun 2012 yaitu sebesar 52,85 (lihat Tabel 2.3.1). Nilai variabel tersebut disumbang oleh lima indikator yang terdapat di dalamnya. Empat dari lima indikator dalam variabel “Hak Memilih dan Dipilih” terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu), karena data yang dicari hanya dapat diperoleh pada tahun penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, seperti tahun-tahun yang lalu (kecuali IDI 2009), IDI 2010, 2011, 2012, dan IDI 2013 tidak mengumpulkan data dari empat indikator tersebut, hanya menggunakan data yang diperoleh dalam pengumpulan IDI 2009.

Keempat indikator tersebut adalah “Kejadian di mana hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat”, “Kejadian yang menunjukkan

ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih”, “Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)”, dan “Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (*voters turnout*)”. Indikator kelima, yakni “Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi”. Indikator ini dikumpulkan datanya dengan mencatat jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi. Perubahan dalam jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi terjadi karena adanya Pergantian Antar Waktu (PAW).

Dari Tabel 2.3.2 terlihat bahwa penyebab kecilnya indeks untuk variabel “Hak Memilih dan Dipilih” adalah dua indikator yakni “Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih” (50,00), di mana nilai indikator

ini tidak mengalami perubahan sejak pengukuran IDI 2009.

Rendahnya nilai variabel “Hak Memilih dan Dipilih” juga disebabkan oleh rendahnya nilai indeks indikator “Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)” (30,00), di mana nilai indikator ini juga tidak mengalami perubahan sejak IDI 2009. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas DPT di Provinsi Riau masih “buruk”. Keluhan-keluhan terhadap DPT terjadi karena buruknya daftar penduduk yang berhak memilih. Kelemahan DPT ini disebabkan karena buruknya koordinasi Komisi Pemilihan Umum dengan Kementerian Dalam Negeri. Banyak yang menganggap bahwa DPT yang digunakan dalam Pemilu 2009 adalah yang terburuk selama penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Kekurangan-kekurangan dalam DPT membuat penyelenggaraan pemilu menjadi buruk.

Penyelenggaraan Pemilu 2009 juga menunjukkan kurangnya perhatian kepada para pemilih yang menyandang

cacat. Tidak banyak ketentuan yang mengatur pelayanan di tempat-tempat pemungutan suara bagi penyandang cacat. Sementara, indikator “Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi” memiliki nilai indeks sebesar 72,73 pada tahun 2013, tidak berubah dibandingkan dengan tahun 2012.

### 2.3.2 Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

Nilai indeks variabel “Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” pada tahun 2013 yaitu 51,52, mengalami peningkatan sebesar 10,05 poin dibandingkan dengan tahun 2012 yang nilainya 41,47 (lihat Tabel 2.3.3). Nilai variabel tersebut disumbang oleh dua indikator yang terdapat di dalamnya.

Kedua indikator dari variabel “Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” tersebut

adalah indikator “Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan” yang nilainya pada tahun 2013 adalah sebesar 3,04, dan indikator “Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan” yang nilainya pada tahun 2013 adalah 100,00.

<http://riau.bps.go.id>

**Tabel 2.3.1**  
**Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Hak-Hak Politik**

Variabel	2009	2010	2011	2012	2013
	65,40	47,19	52,90	47,16	52,19
Hak Memilih dan Dipilih	51,69	51,11	51,11	52,85	52,85
Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan	79,11	43,26	54,68	41,47	51,52

**Tabel 2.3.2**  
**Nilai Indeks Masing-masing Variabel Hak Memilih dan Dipilih**

Variabel Hak Memilih dan Dipilih	2009	2010	2011	2012	2013
	51,69	51,11	51,11	52,85	52,85
Kejadian di mana hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat	94,23	94,23	94,23	94,23	94,23
Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)	68,11	68,11	68,11	68,11	68,11
Jumlah perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi	60,61	54,55	54,55	72,73	72,73

**Tabel 2.3.3**  
**Nilai Indeks Masing-masing Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan**

Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	2009	2010	2011	2012	2013
	79,11	43,26	54,68	41,47	51,52
Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	95,65	34,78	56,52	0,00	3,04
Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	62,57	51,74	52,84	82,94	100,00

## 2.4 Indeks Lembaga Demokrasi

Dibandingkan dengan capaian indeks tahun 2012, secara agregat, aspek Lembaga Demokrasi di Provinsi Riau mengalami peningkatan pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,43 poin (dari 81,89 pada tahun 2012 menjadi 82,32 pada tahun 2013). Capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing 85,39 dan 83,18, di mana nilai indeks selama empat tahun berturut-turut, menempatkan kinerja aspek ini pada kategori yang sama yaitu pada kategori “baik”.

Kenaikan nilai indeks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2013, antara lain dapat dijelaskan berdasarkan kontribusi dari nilai indeks masing-masing variabel dan skor indikator pada aspek yang bersangkutan. Secara khusus, bila dicermati distribusi nilai indeks lima variabel pada aspek Lembaga Demokrasi yaitu: “Pemilu yang Bebas dan Adil”, “Peran DPRD”, “Peran Partai Politik”, “Peran Birokrasi Pemerintah”, dan “Peradilan Independen”, terlihat

dengan jelas bahwa satu-satunya variabel yang telah memberikan kontribusi terhadap penurunan capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2013 adalah “Peran DPRD”, yaitu sebesar 35,68.

Sementara pada tahun sebelumnya (2012) capaian nilai indeks variabel ini adalah 33,51. Empat variabel yang lain, cenderung konstan dalam capaian nilai indeks pada tahun 2013 (lihat Tabel 2.4.1).

Merujuk pada Tabel 2.4.1, sedikitnya ada tiga poin penting yang menarik untuk digarisbawahi terkait dengan konfigurasi angka-angka indeks variabel pada aspek Lembaga Demokrasi. *Pertama*, walaupun dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2013 capaian nilai indeks aspek Lembaga Demokrasi cenderung berfluktuasi (naik dan turun), namun secara kualitatif, capaian kinerja pada kurun waktu empat tahun terakhir masih tetap berada pada posisi yang sama, yaitu pada kategori kinerja “baik”.

*Kedua*, Peran DPRD adalah satu-satunya variabel yang secara konstan berada pada kategori kinerja “buruk” selama lima tahun terakhir dan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap fluktuasi capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2009 hingga tahun 2013. Capaian indeks terendah terkait variabel ini terjadi pada tahun 2012 (33,51). *Ketiga*, menarik untuk dicatat bahwa variabel “Peran Partai Politik” terlihat terus mengalami kenaikan capaian indeks selama kurun waktu 2009 hingga 2013. Capaian ini selanjutnya telah meningkatkan posisi capaian kinerja variabel “Peran Partai Politik” dari kategori “buruk” pada tahun 2009 menjadi kategori “baik” pada tahun 2012 dan 2013.

Penjelasan berikut akan menguraikan secara lebih rinci perolehan nilai indeks setiap variabel.

#### 2.4.1 Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil

Nilai indeks dari variabel “Pemilu yang Bebas dan Adil” di Provinsi Riau cenderung tetap dari tahun 2009 hingga 2013 yaitu sebesar 75,83. Hal ini dikarenakan variabel ini terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu), karena data yang dicari hanya dapat diperoleh pada tahun penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, seperti tahun-tahun yang lalu (kecuali IDI 2009), IDI 2010, 2011, 2012, dan IDI 2013 tidak mengumpulkan data dari dua indikator yang terdapat dalam variabel ini, melainkan hanya menggunakan data yang diperoleh dalam pengukuran IDI 2009.

Dua indikator yang menyumbang nilai indeks variabel “Pemilu yang Bebas dan Adil” yaitu: *pertama*, indikator “Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu” di mana nilainya tidak berubah sejak tahun 2009 hingga 2013 yaitu sebesar 90,91. *Kedua*, indikator “Kejadian atau pelaporan

tentang kecurangan dalam penghitungan suara” di mana nilainya juga tidak berubah sejak tahun 2009 hingga 2013 yaitu sebesar 60,76.

#### 2.4.2 Variabel Peran DPRD

Nilai indeks variabel “Peran DPRD” di Provinsi Riau dari tahun 2009 hingga 2013 cukup berfluktuasi. Penyebab naik turunnya nilai indeks variabel “Peran DPRD” pada tahun 2009 hingga tahun 2013 dalam dimensi kuantitatif, dapat dijelaskan oleh capaian skor empat indikator, di mana dua di antaranya mengalami penurunan, dan dua indikator lainnya mengalami kenaikan (lihat Tabel 2.4.3).

Dua indikator yang mengalami penurunan nilai skor tersebut masing-masing adalah : (a) “Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan terhadap Total APBD”, mengalami penurunan sebesar 3,26 poin pada tahun 2013, di mana nilai skor indikator pada tahun 2012 adalah 28,02 menjadi 24,76 pada tahun 2013. Penurunan skor terbesar dari indikator

ini terjadi pada tahun 2010 ke tahun 2011 yang turun sebesar 57,74 poin (lihat Grafik 2.4.1); (b) “Jumlah Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif”, mengalami penurunan sebesar 3,57 poin dari tahun 2012 ke tahun 2013, di mana nilai skor pada tahun 2012 adalah 7,14 menjadi 3,57 pada tahun 2013.

Sedangkan indikator yang mengalami kenaikan adalah: (a) “Persentase Alokasi Anggaran Kesehatan” terjadi kenaikan sebesar 9,60 poin dari tahun 2012 ke tahun 2013 (lihat Grafik 2.4.1); (b) “Jumlah Perda Yang Berasal Dari Hak Inisiatif DPRD Terhadap Jumlah Total Perda yang Dihasilkan” mengalami peningkatan sebesar 4,76 poin dari tahun 2012 ke tahun 2013.

#### 2.4.3 Variabel Peran Partai Politik

Nilai indeks variabel “Peran Partai Politik” di Provinsi Riau dari tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Penyebab meningkatnya nilai indeks

variabel “Peran Partai Politik” dari tahun 2009 hingga tahun 2013 dalam dimensi kuantitatif, dapat dijelaskan oleh capaian skor dua indikator (lihat Tabel 2.4.4).

Dua indikator yang mempengaruhi kenaikan nilai indeks variabel “Peran Partai Politik” adalah: *pertama*, indikator “Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Parpol Peserta Pemilu” yang sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 skornya sudah mencapai 100,00.

#### 2.4.4 Variabel Peran Birokrasi Pemerintah

Nilai indeks dari variabel “Peran Birokrasi Pemerintah” di Provinsi Riau cenderung tetap dari tahun 2009 hingga 2013 yaitu sebesar 94,11. Hal ini dikarenakan variabel ini terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu), karena data yang dicari hanya dapat diperoleh pada tahun penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, seperti tahun-tahun yang lalu (kecuali IDI 2009), IDI 2010, 2011, 2012, dan IDI 2013 tidak mengumpulkan data dari dua indikator yang terdapat dalam

variabel ini, melainkan hanya menggunakan data yang diperoleh dalam pengumpulan IDI 2009.

Dua indikator yang menyumbang nilai indeks variabel “Peran Birokrasi Pemerintah” yaitu: *pertama*, indikator “Laporan dan Berita Penggunaan Fasilitas Pemerintah Untuk Kepentingan Calon/Parpol Tertentu Dalam Pemilu Legislatif” di mana nilainya tidak berubah sejak tahun 2009 hingga 2013 yaitu sebesar 98,83. *Kedua*, indikator “Laporan dan Berita Keterlibatan PNS dalam Kegiatan Politik Parpol pada Pemilu Legislatif” di mana nilainya juga tidak berubah sejak tahun 2009 hingga 2013 yaitu sebesar 89,39 (lihat Tabel 2.4.5).

#### 2.4.5 Variabel Peran Peradilan yang Independen

Nilai indeks dari variabel “Peran Peradilan yang Independen” di Provinsi Riau cenderung tetap dari tahun 2009 hingga tahun 2013 yaitu sebesar 100,00. Dua indikator yang menyumbang nilai indeks variabel “Peran Peradilan yang

Independen”, yaitu: *pertama*, Secara kualitatif, distribusi capaian “Keputusan Hakim yang Kontroversial” skor kedua indikator tersebut pada di mana nilainya tidak berubah sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 tahun 2009 hingga 2013 yaitu sebesar mengindikasikan bahwa kinerja peradilan 100,00. *Kedua*, indikator “Penghentian dalam menyelesaikan berbagai macam Penyidikan yang Kontroversial oleh Jaksa kasus pidana di Provinsi Riau sudah atau Polisi” di mana nilainya juga tidak sangat “baik” dan independen. berubah sejak tahun 2009 hingga 2013 yaitu sebesar 100,00 (lihat Tabel 2.4.6).

<http://riau.bps.go.id>

**Tabel 2.4.1**  
**Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Lembaga Demokrasi**

Variabel	2009	2010	2011	2012	2013
	70,68	85,39	83,18	81,89	82,32
Pemilu yang Bebas dan Adil	75,83	75,83	75,83	75,83	75,83
Peran DPRD	45,62	54,58	41,99	33,51	35,68
Peran Partai Politik	30,99	96,69	98,07	100,00	100,00
Peran Birokrasi Pemerintah	94,11	94,11	94,11	94,11	94,11
Peran Peradilan yang Independen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Tabel 2.4.2**  
**Nilai Indeks Masing-masing Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil**

Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil	2009	2010	2011	2012	2013
	75,83	75,83	75,83	75,83	75,83
Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	60,76	60,76	60,76	60,76	60,76

**Tabel 2.4.3**  
**Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran DPRD**

Variabel Peran DPRD	2009	2010	2011	2012	2013
	45,62	54,58	41,99	33,51	35,68
Alokasi anggaran pendidikan terhadap total APBD	65,55	99,41	41,67	28,02	24,76
Alokasi anggaran kesehatan terhadap total APBD	68,70	65,98	64,34	56,09	65,69
Jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan	0,00	0,00	11,11	28,57	33,33
Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	7,14	0,00	28,57	7,14	3,57

**Tabel 2.4.4**  
**Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran Partai Politik**

Variabel Peran Partai Politik	2009	2010	2011	2012	2013
	30,99	96,69	98,07	100,00	100,00
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	28,57	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	52,73	66,90	80,73	100,00	100,00

**Tabel 2.4.5**  
**Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran Birokrasi Pemerintah**

Variabel Peran Birokrasi Pemerintah	2009	2010	2011	2012	2013
	94,11	94,11	94,11	94,11	94,11
Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif	98,83	98,83	98,83	98,83	98,83
Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif	89,39	89,39	89,39	89,39	89,39

**Tabel 2.4.6**  
**Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran Peradilan yang Independen**

Variabel Peran Peradilan yang Independen	2009	2010	2011	2012	2013
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Keputusan hakim yang kontroversial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



<http://riau.bps.go.id>

## KESIMPULAN



## Kesimpulan

---

Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau Tahun 2009 – 2013 memperlihatkan gambaran dan kecenderungan perkembangan demokrasi di Provinsi Riau yang penting untuk dicermati. *Pertama*, meskipun dari agregasi capaian keseluruhan aspek dan kualitas demokrasi di Provinsi Riau pada umumnya tergolong pada kategori “sedang”, namun kecenderungannya semakin mendekati batas untuk masuk ke dalam kategori “buruk”. *Kedua*, pada aspek Kebebasan Sipil terjadi pencapaian demokrasi yang membanggakan. Akan tetapi aspek ini telah mengalami penurunan terus menerus sejak tahun 2009; dan untuk pertama kalinya pula indeks Kebebasan Sipil tahun 2013 ini turun di bawah angka 80, yang berarti keluar dari kategori “baik” menjadi kategori “sedang”.

Dapat dipastikan bahwa turunnya nilai indeks aspek Kebebasan Sipil

mencerminkan adanya hambatan serius dalam konsolidasi demokrasi di Provinsi Riau. Hambatan tersebut, terlihat dalam upaya pemenuhan hak asasi warga terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hambatan tersebut justru datang dari pemerintah daerah dan aparaturnya berupa aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya serta tindakan/ Pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya. Selain itu, pemerintah belum melakukan pendidikan politik secara optimal sehingga masyarakat belum matang dalam berdemokrasi. Indikasinya antara lain masyarakat cenderung tidak taat hukum, kurang toleran, mudah marah dan mengamuk, melanggar hak asasi sesama warga, penggunaan cara-cara kekerasan dan bahkan bertindak brutal.

Selain itu, menurunnya nilai indeks aspek Kebebasan Sipil jelas

mengindikasikan defisit demokrasi. Kondisi kebudayaan dan struktur politik belum sepenuhnya demokratis. Secara formal-struktural kita memiliki lembaga demokrasi yang lengkap berupa Pemilu, Partai Politik, Parlemen, Peradilan, tapi masalahnya, nilai-nilai yang melandasi lembaga demokrasi tersebut belum sepenuhnya demokratis. Demokrasi adalah sistem politik yang tujuan akhirnya adalah mempertahankan martabat manusia sebagai warga negara melalui pemenuhan hak-hak sipil dan politik mereka sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Keberhasilan demokrasi terukur dari seberapa jauh pemenuhan hak-hak asasi warga negara sebagai bentuk konkret penghormatan terhadap martabat manusia.

Sementara itu, pada tahun 2013 aspek Hak-Hak Politik di Provinsi Riau tetap menunjukkan indeks paling rendah di antara ketiga aspek. Indeks Hak-Hak Politik termasuk ke dalam kategori “buruk” karena nilainya lebih kecil dari 60. Buruknya capaian kinerja indeks Hak-

Hak Politik disebabkan banyaknya demonstrasi yang bersifat kekerasan di Provinsi Riau. Demonstrasi memang merupakan hak politik rakyat dalam demokrasi, namun haruslah dilakukan secara damai karena demonstrasi adalah proses penyampaian aspirasi/kepentingan rakyat kepada pemerintah. Demokrasi menuntut proses penyampaian itu dilakukan secara damai dan tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum dan pengrusakan terhadap barang-barang milik publik.

Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan, merupakan faktor penyebab lain bagi capaian indeks aspek Hak-Hak Politik. Demokrasi menuntut adanya warga masyarakat yang peka terhadap kepentingan publik dan menyampaikan keluhan mereka kepada pemerintah agar pemerintah dapat memperbaiki hal tersebut. Semakin besar jumlah pengaduan yang disampaikan oleh warga masyarakat, semakin baik

perkembangan demokrasi di Provinsi Riau.

Demikian pula halnya dengan indeks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2013, merupakan capaian indeks tertinggi di antara ketiga aspek IDI yang menempatkan kinerja Lembaga Demokrasi di Provinsi Riau pada kategori “baik”.

Sedikitnya ada tiga poin penting yang menarik untuk dicatat terkait dengan capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2013, beserta indeks variabel-variabel yang ada di dalamnya. *Pertama*, walaupun dalam dimensi kuantitatif capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2010 hingga tahun 2013 mengalami fluktuasi, namun secara kualitatif capaian kinerja pada kurun waktu empat tahun terakhir masih tetap berada pada posisi yang sama, yaitu pada kategori kinerja “baik”.

*Kedua*, “Peran DPRD” adalah satu-satunya variabel yang secara konstan berada pada kategori kinerja “buruk” selama lima tahun pengukuran IDI di

Provinsi Riau dan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap fluktuasi capaian indeks selama lima tahun pengukuran IDI. *Ketiga*, variabel “Peran Partai Politik” terlihat terus mengalami kenaikan capaian indeks selama empat tahun terakhir, yang selanjutnya telah memposisikan kinerja dari variabel ini termasuk kategori “baik” pada tahun 2010 hingga tahun 2013.





# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<http://riau.bps.go.id>



BPS Provinsi Riau  
Jl. Pattimura No. 12 Pekanbaru 28131  
Telp. (0761) 23042-21336, Fax : (0761) 21336  
E-mail : bps1400@bps.go.id